

**KEPENTINGAN INDONESIA DALAM INTEGRASI FINANSIAL ASEAN
MELALUI QR CROSS BORDER**

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Strata-1



OLEH:

IRMALIA FARDHANI

201710360311002

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**KEPENTINGAN INDONESIA DALAM INTEGRASI FINANSIAL
MELALUI QR CROSS BORDER**

Diajukan Oleh :

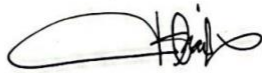
IRMALIA FARDHANI

201710360311002

Telah disetujui
Selasa / 09 Juli 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Demeiati Nur Kusumaningrum M.A



Dedik Fitra Suhermanto M.Hub.Int



Narainuddin, Chairur Rijal, M. Hub. Int

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Prof. Gonda Yumitro, MA., Ph D

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :





Irmalia Fardhani

201710360311002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
LULUS

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S-1) Hubungan Internasional
Pada hari 02 Juli 2024
Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. **Havidz Ageng Prakoso, M.A** ()
2. **Devita Prinanda, S.IP., M. Hub.Int** ()
3. **Demeiati Nur Kusumaningrum, S.IP., M.A** ()
4. **Dedik Fitra Suhermanto, S.IP., M.Hub.Int** ()

Mengetahui,
Wakil Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik



Najamuddin Khairul Rijal, M. Hub. Int



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irmalia Fardhani
NIM : 201710360311002
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
Kepentingan Indonesia Dalam Integrasi Finansial ASEAN Melalui QR Cross Border
adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Juni 2024
Yang Menyatakan,



Irmalia Fardhani

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM INTEGRASI FINANSIAL ASEAN MELALUI QR CROSS BORDER

Irmalia Fardhani¹;

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

¹ Email: fardhaniirmalia@gmail.com

Abstract

This research explores Indonesia's interests in ASEAN financial integration through the implementation of QR Cross Border. The background to this research is rooted in the ASEAN agreement to strengthen cooperation and harmonization of policies in the financial sector, which is regulated in the Roadmap for ASEAN Integration in Finance (RIA-Fin). QR Cross Border is an important innovation in the cross-border payment system which allows financial transactions between ASEAN countries to be carried out more efficiently and safely via QR codes. The implementation of this technology is expected to facilitate cross-border trade, increase regional economic integration, and strengthen Indonesia's position in the ASEAN economic security architecture. This research uses the concept of Regional Integration and National Interests to analyze how QR Cross Border supports Indonesia's national interests, especially in increasing transaction efficiency, supporting financial stability, and increasing the competitiveness of Indonesian banking at the international level.

Keywords: ASEAN Financial Integration, Cross Border Trade, Digital Payment Systems, Indonesian National Interests, QR Cross Border.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT bahwasanya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul : “KEPENTINGAN INDONESIA DALAM INTEGRASI FINANSIAL ASEAN MELALUI QR CROSS BORDER”. Adapun tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Demeiati Nur Kusumaningrum, M.A sebagai pembimbing utama yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub.Int sebagai pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof.Gonda Yumitro,MA.,Ph D sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
4. Seluruh dosen program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis sebagai mahasiswa.
5. Kedua orangtua tercinta, serta keluarga yang tersayang yang tak henti memberi semangat dan dorongan serta bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini.
6. Teman-teman saya yang sudah membantu saya dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhirnya, besar harapan saya semoga skripsi ini dapat digunakan dengan baik dan penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, Agustus 2024

IRMALIA FARDHANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
LEMBAR PENGESAHAN	3
SURAT PERNYATAAN	4
ABSTRAK	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	7
A. PENDAHULUAN	8
B. METODE	9
C. TEORI/KONSEP	10
D. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
1. Sejarah Integrasi Finansial ASEAN	13
2. Kepentingan Ekonomi Indonesia	18
2.1 Potensi Peningkatan Perdagangan	18
2.2 Transparansi dan Keamanan Dalam Transaksi Lintas Negara	20
E. KESIMPULAN	25
DAFTAR PUSTAKA	26
PLAGIASI	28

A. Pendahuluan

Demi tercapainya integrasi keuangan dan moneter yang lebih mendalam pada tahun 2015, ASEAN menyepakati Roadmap for ASEAN Integration in Finance (RIA-Fin) pada tahun 2003. Roadmap ini menjadi panduan strategis bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan harmonisasi kebijakan di sektor keuangan. Terdapat tiga komponen utama dalam RIA-Fin, yaitu: pembangunan pasar kapital ASEAN, yang bertujuan menciptakan pasar finansial yang lebih terintegrasi dan efisien di kawasan; liberalisasi pelayanan keuangan, yang mendorong keterbukaan dan akses yang lebih besar terhadap layanan keuangan antar negara anggota; serta liberalisasi rekening modal, yang memungkinkan aliran modal yang lebih bebas dan fleksibel di antara negara-negara ASEAN (ASEAN Secretariat, t.thn.). Ketiga aspek ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas finansial, dan memperkuat posisi ASEAN di kancah ekonomi global.

Indonesia mendukung integrasi perbankan ASEAN sebagai langkah penting untuk memajukan integrasi ekonomi dan keuangan di kawasan ini. Melalui Bank Indonesia, Indonesia menyetujui ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) Guidelines. Panduan ini akan menjadi kerangka operasional bagi negara-negara ASEAN dalam menerapkan prinsip-prinsip dan proses integrasi perbankan di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan menyetujui ABIF Guidelines, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor perbankan regional, meningkatkan efisiensi pasar keuangan, dan mendukung stabilitas ekonomi di ASEAN. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing perbankan Indonesia di tingkat internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kawasan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Standarisasi sistem pembayaran digital di tingkat nasional adalah langkah awal yang penting menuju pembentukan sistem pembayaran digital regional di ASEAN. Pada tahun 2022, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina menandatangani sebuah perjanjian untuk tujuan ini, menandai pencapaian signifikan dalam integrasi keuangan regional. Inisiatif ini merupakan prioritas bagi Indonesia, yang secara aktif mendorong standarisasi sistem pembayaran digital selama KTT ASEAN pada bulan Mei 2023. Pada akhir tahun 2023, sebagian besar negara penandatanganan diharapkan telah memiliki sistem tersebut beroperasi. Setelah standarisasi nasional ini tercapai, langkah berikutnya adalah memperluas konektivitas sistem pembayaran QR regional ke luar ASEAN, membuka jalan bagi integrasi internasional yang lebih luas dan memfasilitasi transaksi lintas batas yang lebih lancar (Guild, 2023).

Sebelumnya, pada Januari 2023, Indonesia dan Malaysia menguji coba sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR, yang secara resmi menjadi metode pembayaran lintas batas yang diakui pada 8 Mei 2023. Inisiatif ini mengikuti keberhasilan implementasi kerjasama serupa antara Indonesia dan Thailand. Menurut data dari Bank Indonesia, wisatawan Indonesia di Thailand melakukan 14.555

transaksi menggunakan kode QR Thailand, dengan nilai sebesar Rp 8,54 miliar. Sebaliknya, wisatawan Thailand di Indonesia menyelesaikan 492 transaksi menggunakan QRIS, dengan total Rp 114 juta. Mengingat hasil positif ini, Bank Indonesia secara aktif mempromosikan adopsi QRIS sebagai metode pembayaran resmi di negara-negara ASEAN lainnya. Tujuannya adalah agar setiap bank sentral dapat menstandarkan pembayaran digital melalui aplikasi keuangan digital, seperti mobile banking dan dompet elektronik, sehingga meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi lintas batas di kawasan ini (Kominfo, 2023).

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mendalami kepentingan Indonesia dalam penerapan QR Cross Border di ASEAN, terutama dalam konteks integrasi finansial regional. Dengan memanfaatkan QRIS sebagai alat pembayaran lintas batas, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam ekonomi digital yang semakin berkembang di kawasan ini. Penelitian ini menjadi penting karena mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses integrasi finansial ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi teknologi QR Cross Border dapat memfasilitasi perdagangan lintas batas ASEAN dengan lebih efisien, meningkatkan integrasi ekonomi regional, serta menguatkan posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan ekonomi ASEAN. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengajukan satu pertanyaan yaitu “Bagaimana kepentingan Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN melalui QR Cross Border?”

B. Metode

Dalam Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dalam hubungan internasional merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi di tingkat internasional atau antarnegara. Metode ini fokus pada pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik suatu situasi atau peristiwa tanpa melakukan generalisasi statistik (Maxwell, 2013). Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif dan detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar negara, kebijakan luar negeri, konflik internasional, atau dinamika kerjasama regional. Penelitian kualitatif deskriptif sering kali dilakukan untuk mengungkapkan kompleksitas dalam keputusan politik luar negeri, persepsi masyarakat terhadap isu internasional, atau untuk memahami dinamika diplomasi antar negara.

Dalam penelitian ini, sumber data kualitatif merupakan pijakan yang penting untuk memahami konteks dan dinamika suatu isu. Sumber data kualitatif primer berasal dari dokumen resmi pemerintah (Suwendra, 2018). Seperti, dokumen perundang-undangan dari Kementerian Keuangan mengenai kebijakan fiskal, memberikan landasan yang kuat untuk memahami kerangka hukum dan panduan

operasional yang berlaku. Di sisi lain, sumber data kualitatif sekunder, seperti laporan penelitian, artikel jurnal, buku, dan berita, menyediakan analisis mendalam tentang isu-isu spesifik melalui pendekatan kualitatif seperti analisis wacana atau penelitian etnografi. Artikel jurnal ilmiah memberikan perspektif akademis yang terperinci, sementara berita menyediakan informasi aktual tentang perkembangan terbaru yang relevan. Gabungan kedua jenis sumber ini tidak hanya memberikan konteks yang kaya dan pemahaman mendalam tentang isu-isu kompleks, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang kuat dalam kebijakan publik dan analisis kebijakan.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, atau literature review, merupakan metode yang sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari sumber-sumber teks dan publikasi yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi literatur yang relevan, pengumpulan data dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, serta analisis dan interpretasi informasi yang diperoleh untuk mendukung penelitian atau analisis yang sedang dilakukan (Suwendra, 2018).

Setelah literatur relevan terkumpul, langkah berikutnya adalah evaluasi kritis terhadap setiap sumber yang dipilih. Ini termasuk menilai metodologi penelitian yang digunakan, keandalan data, serta relevansi temuan dengan topik penelitian. Analisis ini membantu peneliti memahami sudut pandang yang berbeda-beda terhadap topik dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang mungkin ada dalam literatur yang telah ada. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dari literatur direview dan disintesis untuk menyusun sintesis atau analisis yang komprehensif tentang topik penelitian. Ini melibatkan proses mengidentifikasi pola-pola, tren, atau tema tertentu yang muncul dari literatur yang telah dikaji, serta memetakan hubungan antar konsep atau teori yang relevan (Suwendra, 2018).

C. Teori/ Konsep

Ekonomi Politik Internasional

Konsep Teori Ekonomi Politik Internasional (International Political Economy atau IPE) adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi dalam konteks global. Teori ini mengkaji bagaimana kekuatan politik, institusi, dan kebijakan mempengaruhi kegiatan ekonomi internasional seperti perdagangan, investasi, dan arus keuangan. IPE juga menganalisis dampak ekonomi global terhadap kekuasaan politik dan kebijakan nasional (Oatley, 2018). Salah satu konsep utama dalam IPE adalah liberalisme ekonomi.

Liberalisme ekonomi adalah teori dan pendekatan dalam ekonomi politik yang menekankan pentingnya pasar bebas, perdagangan internasional, dan minimnya campur tangan pemerintah dalam

ekonomi. Akar dari liberalisme ekonomi dapat ditelusuri kembali ke tulisan para pemikir Pencerahan seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Dalam prinsip dasar liberalisme ekonomi, pasar bebas dianggap sebagai mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui interaksi penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Teori ini juga mendukung perdagangan internasional berdasarkan teori keunggulan komparatif, yang menyatakan bahwa negara-negara seharusnya mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa yang dapat mereka hasilkan dengan lebih efisien dibanding negara lain. Kepemilikan pribadi adalah dasar dari sistem ekonomi liberal, di mana individu memiliki hak untuk memiliki dan mengendalikan properti mereka sendiri (Bakry, 2015).

Selain itu, peran pemerintah dalam ekonomi seharusnya terbatas pada menjaga hukum dan ketertiban, melindungi hak milik, dan menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan oleh pasar. Konsep *laissez-faire* atau "biarkan saja" mengacu pada prinsip ini, mendukung penghapusan hambatan perdagangan, tarif, dan regulasi yang membatasi kebebasan ekonomi. Liberalisme ekonomi juga berpendapat bahwa pasar yang kompetitif cenderung efisien dalam mengalokasikan sumber daya, dengan harga di pasar yang kompetitif mencerminkan informasi yang tersedia dan membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga didukung untuk mencari peluang yang paling menguntungkan baik dalam skala nasional maupun internasional (Bakry, 2015).

Konsep Integrasi Regional

Salah satu konsep turunan dari liberalisme ekonomi adalah teori integrasi regional. Teori integrasi regional, yang berakar pada prinsip-prinsip liberalisme ekonomi, telah berkembang seiring dengan meningkatnya interdependensi global. Teori ini menekankan bahwa kerjasama ekonomi yang erat antar negara dapat membawa manfaat yang lebih besar dibandingkan jika negara-negara tersebut bertindak secara terpisah. Pemikiran ini mendapat dorongan kuat pasca-Perang Dunia II ketika negara-negara Eropa mulai membentuk kesatuan ekonomi untuk mencegah konflik di masa depan dan meningkatkan kesejahteraan bersama (Perwita & Yani, 2011).

Salah satu pemikir utama dalam teori integrasi regional adalah Ernst Haas, yang dikenal dengan kontribusinya melalui teori neofungsionalisme. Dalam karyanya, Haas berpendapat bahwa integrasi regional dapat dimulai dengan sektor-sektor ekonomi yang terbatas dan secara bertahap meluas ke bidang-bidang lainnya melalui "spillover effects." Konsep ini menjelaskan bagaimana kerjasama awal dalam sektor ekonomi tertentu dapat menciptakan kebutuhan dan insentif untuk kerjasama lebih lanjut dalam sektor-sektor lain, sehingga mendorong proses integrasi yang lebih luas dan mendalam. Karya Haas, terutama buku "The Uniting of Europe" (1958), menjadi landasan penting dalam studi integrasi regional (Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, 2001).

Selain Haas, pemikir lain seperti David Mitrany juga memberikan kontribusi penting. David Mitrany adalah seorang pemikir yang menekankan pentingnya kerjasama praktis antar negara untuk menciptakan perdamaian dan integrasi internasional. Teorinya tentang integrasi fungsional menyatakan bahwa kolaborasi dalam bidang seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan dapat membangun hubungan yang lebih baik antar negara. Mitrany percaya bahwa dengan menyelesaikan masalah bersama secara praktis, negara-negara dapat saling tergantung dan membangun kepercayaan satu sama lain, mengurangi kemungkinan konflik. Pendekatannya menyoroti pentingnya solusi praktis atas isu-isu global untuk mempromosikan solidaritas internasional di luar politik dan ekonomi tradisional, membuka jalan bagi integrasi yang lebih mendalam di masa depan (Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, 2001).

Dalam perkembangan lebih lanjut, teori integrasi regional mencakup berbagai bentuk kerjasama, mulai dari zona perdagangan bebas hingga kesatuan ekonomi yang lebih mendalam seperti Uni Eropa. Di Asia Tenggara, pembentukan ASEAN dan inisiatifnya untuk menciptakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mencerminkan penerapan teori ini dalam konteks yang berbeda. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan perwujudan konkret dari teori integrasi regional dalam konteks Asia Tenggara. Sejak pembentukannya pada tahun 1967, ASEAN telah mengadopsi pendekatan bertahap terhadap integrasi ekonomi dan politik di antara anggotanya. MEA, yang diluncurkan pada tahun 2015, bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi di seluruh wilayah ASEAN (ASEAN Secretariat, t.thn.). Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip liberalisme ekonomi dengan menghapuskan hambatan perdagangan, memfasilitasi investasi asing, dan meningkatkan kerjasama di sektor-sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan teknologi.

MEA juga mengadopsi elemen-elemen dari teori integrasi fungsional David Mitrany dengan menekankan pentingnya kerjasama dalam bidang teknis dan administratif untuk meningkatkan ketergantungan dan kepercayaan antar negara anggota. Selain itu, MEA memperlihatkan relevansi teori integrasi regional dalam mengatasi tantangan bersama seperti integrasi ekonomi global, perubahan iklim, dan krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan ekonomi yang signifikan di antara anggota dan masalah implementasi kebijakan yang konsisten, MEA menunjukkan potensi besar dalam membentuk ASEAN sebagai blok ekonomi yang kuat dan kompetitif di panggung global. Dengan demikian, MEA memberikan contoh konkret bagaimana teori integrasi regional dapat diterapkan dan memainkan peran penting dalam mengembangkan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik di Asia Tenggara.

Salah satu wujud penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah integrasi sistem finansial regional, yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi antar negara anggota ASEAN. Dalam proses ini, salah satu inovasi penting yang diperkenalkan adalah QR Cross Border,

sebuah sistem pembayaran lintas negara yang menggunakan kode QR untuk memfasilitasi transaksi keuangan. QR Cross Border memungkinkan pengguna di satu negara untuk melakukan pembayaran di negara lain dengan mudah dan cepat, hanya dengan memindai kode QR, sehingga mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses pembayaran. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat di seluruh ASEAN. Dengan memanfaatkan teknologi digital, QR Cross Border mendorong inklusi keuangan dan mendukung perkembangan ekonomi digital di kawasan ini. Integrasi sistem finansial melalui QR Cross Border juga memperkuat stabilitas finansial regional dengan meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi lintas negara. Hal ini mencerminkan komitmen ASEAN untuk menciptakan pasar keuangan yang lebih terintegrasi dan kompetitif, sejalan dengan tujuan utama MEA dalam meningkatkan daya saing ekonomi kawasan di tingkat global (ASEAN Secretariat, t.thn.).

Relevansi teori ini semakin meningkat dalam menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan pandemi, yang menuntut respons kolektif dan terkoordinasi. Dalam kerangka liberalisme ekonomi, integrasi regional dipandang sebagai cara untuk memaksimalkan efisiensi pasar, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing global melalui skala ekonomi yang lebih besar dan akses pasar yang lebih luas. Namun, tantangan seperti ketidaksetaraan regional, masalah kedaulatan, dan resistensi terhadap perubahan mengharuskan adanya pendekatan yang hati-hati dan adaptif dalam menerapkan teori ini. Oleh sebab itu diperlukan konsep Kepentingan Nasional untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam integrasi sistem finansial ASEAN.

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep sentral dalam teori hubungan internasional yang dikembangkan oleh berbagai pemikir seperti Hans Morgenthau dan John Mearsheimer. Morgenthau, seorang tokoh utama dalam aliran realisme, memandang kepentingan nasional sebagai motivasi utama di balik tindakan politik negara. Menurutnya, negara cenderung bertindak untuk mempertahankan keamanan nasional, mengamankan sumber daya, dan memperluas pengaruh mereka di tingkat internasional, semua demi kepentingan yang dianggap vital untuk kelangsungan hidup negara itu sendiri (Perwita & Yani, 2011).

Sementara itu, Mearsheimer mengembangkan konsep realisme struktural yang menekankan sistem anarki internasional. Dalam pandangannya, negara-negara dihadapkan pada lingkungan tanpa otoritas sentral yang mengatur interaksi mereka. Akibatnya, negara-negara diharapkan untuk memprioritaskan kepentingan keamanan mereka sendiri dengan cara yang kadang-kadang berlawanan dengan aspirasi kerjasama internasional. Mearsheimer mengamati bahwa persaingan untuk pengaruh dan kekuatan seringkali menjadi hasil langsung dari kepentingan nasional yang berlawanan antara

negara-negara besar maupun kecil (Perwita & Yani, 2011).

Lebih lanjut, kepentingan nasional menjadi dasar untuk menganalisis tindakan dan motivasi negara-negara berdaulat. Konsep ini mencakup kebutuhan dan keinginan yang dipersepsikan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain (Rochester, 1978). Kerangka konseptual ini bertujuan untuk memperjelas tujuan dan aspirasi yang mendorong kebijakan luar negeri suatu negara, khususnya yang berfokus pada kepentingan ekonomi dan tatanan dunia.

Dalam pandangan Nuechterlein, kepentingan nasional dapat dipahami sebagai hasil dari proses politik yang melibatkan persepsi dan interpretasi para pemimpin negara terhadap kebutuhan dan keinginan negara mereka. Definisi ini menyoroti bahwa keputusan tentang apa yang menjadi kepentingan nasional bukanlah hasil dari pemikiran individual yang terisolasi, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai pemangku kepentingan yang memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda (Nuechterlein, 1976). Oleh karena itu, kepentingan nasional sering kali mencerminkan konsensus yang diperoleh melalui negosiasi dan kompromi di antara para pemimpin politik. Selain itu, konsep ini juga membedakan antara kepentingan eksternal dan kepentingan internal (publik) suatu negara, dengan fokus pada bagaimana negara berinteraksi dengan lingkungan internasionalnya untuk memenuhi tujuan-tujuannya (Nuechterlein, 1976).

Pendekatan Nuechterlein terhadap definisi kepentingan nasional memiliki implikasi signifikan bagi analisis dan pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Dengan membagi kepentingan nasional menjadi beberapa kategori, dalam penelitian ini kerangka konseptual Nuechterlein dalam kepentingan nasional memiliki relevansi dalam aspek kepentingan ekonomi dan kepentingan tatanan dunia (Nuechterlein, 1976).

Kepentingan ekonomi adalah komponen penting dari kepentingan nasional, yang menyoroti upaya suatu negara untuk kesejahteraan ekonomi dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Kepentingan ini melibatkan peningkatan perdagangan, pengamanan akses ke sumber daya vital, dan memastikan kondisi ekonomi yang menguntungkan bagi pertumbuhan negara. Misalnya, perlindungan aset perusahaan multinasional di luar negeri, seperti investasi perusahaan minyak, sering kali membentuk keputusan kebijakan luar negeri. Intensitas kepentingan ekonomi dapat bervariasi, dengan beberapa isu mencapai tingkat penting yang memerlukan tindakan kuat untuk melindungi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks global, kepentingan ekonomi mendorong negara-negara untuk membentuk aliansi, merundingkan perjanjian perdagangan, dan terkadang terlibat dalam konflik untuk mengamankan keuntungan ekonomi (Nuechterlein, 1976).

Dalam kajian praktis, kepentingan nasional mencakup berbagai dimensi, termasuk ekonomi, politik, keamanan, dan budaya. Pengertian ini juga relevan dalam konteks globalisasi, di mana

negara-negara harus menavigasi antara pemenuhan kepentingan domestik dan keterlibatan dalam kerjasama internasional yang semakin kompleks. Oleh karena itu, analisis Morgenthau dan Mearsheimer memperkuat pemahaman tentang betapa pentingnya kepentingan nasional dalam membentuk strategi luar negeri yang efektif dan kebijakan yang dapat mempromosikan keamanan dan kesejahteraan negara di tengah dinamika hubungan internasional yang terus berubah.

Dalam konteks Indonesia, konsep kepentingan nasional menyoroti prioritas utama dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan negara dalam konteks yang unik sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Fokus utama mencakup perlindungan terhadap integritas wilayah, stabilitas politik internal, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, kepentingan ekonomi menjadi pusat perhatian dengan upaya untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Di arena internasional, Indonesia menganut prinsip non-blok, perdamaian, dan kesejahteraan bersama dalam hubungan luar negeri, sambil mempertahankan identitas budaya yang kaya dan kearifan lokal (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Keentingan nasional Indonesia dalam konteks diplomasi ekonomi yang dipromosikan oleh Presiden Jokowi menyoroti upaya untuk memperluas akses pasar global bagi produk-produk Indonesia, meningkatkan investasi asing langsung (FDI), serta memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat internasional. Strategi ini mencakup berbagai inisiatif seperti peningkatan konektivitas infrastruktur melalui proyek-proyek seperti Pelabuhan Patimban dan Jalan Tol Trans-Sumatera, serta peningkatan daya saing industri manufaktur dan produk pertanian Indonesia di pasar global (Kementerian Luar Negeri RI, 2024).

Dalam konteks ASEAN, kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi ekonomi yang dipromosikan oleh Presiden Jokowi menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan potensi integrasi regional guna memperluas pasar bagi produk Indonesia serta meningkatkan investasi dan kerjasama ekonomi di kawasan. ASEAN sebagai blok ekonomi terbesar kelima di dunia dan pasar tunggal yang terintegrasi memberikan platform penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara.

Presiden Jokowi telah mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur antarnegara ASEAN, seperti melalui proyek-proyek jalan tol dan pelabuhan yang mendukung arus barang dan investasi (BPMI Setpres, 2023). Hal ini tidak hanya memfasilitasi perdagangan intra-ASEAN yang lebih lancar, tetapi juga memungkinkan Indonesia untuk lebih kompetitif dalam rantai pasok regional dan global. Selain itu, diplomasi ekonomi Jokowi di ASEAN berfokus pada memperkuat integrasi sektor industri, peningkatan kerjasama dalam pengembangan teknologi dan inovasi, serta mendukung pengembangan SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di seluruh kawasan ASEAN. Ini sejalan dengan visi ASEAN sebagai kawasan yang dinamis dan

terintegrasi secara ekonomi, yang menghasilkan manfaat bersama bagi semua negara anggota.

Di tengah dinamika geopolitik global, ASEAN juga menjadi platform penting bagi Indonesia untuk mempromosikan stabilitas politik dan keamanan, serta memperkuat posisinya dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, keamanan maritim, dan tantangan kesehatan global. Dengan demikian, diplomasi ekonomi Jokowi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga mengamankan posisi strategis Indonesia dalam konteks regional ASEAN yang semakin terintegrasi dan berdaya saing.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Integrasi Finansial ASEAN

Kawasan Pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, merupakan respons terhadap kebutuhan negara-negara Asia Tenggara untuk menciptakan stabilitas regional dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan sosial di tengah ketegangan Perang Dingin. Lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melihat pentingnya kerjasama regional untuk mengatasi tantangan ekonomi dan politik (ASEAN Secretariat, t.thn.). Dalam bidang finansial, inisiatif awal ASEAN berfokus pada peningkatan kerjasama ekonomi yang lebih luas, termasuk pengembangan infrastruktur keuangan yang mendukung perdagangan antar negara anggota. Salah satu langkah pertama yang signifikan adalah pembentukan ASEAN Swap Arrangement (ASA) pada tahun 1977, yang bertujuan untuk menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek bagi negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. ASA menjadi fondasi awal bagi kerjasama finansial yang lebih dalam di masa mendatang, yang akhirnya berkembang menjadi inisiatif-inisiatif yang lebih komprehensif seperti ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) dan ASEAN Capital Markets Forum (ACMF).

Integrasi finansial ASEAN mengacu pada upaya bersama untuk menyatukan sistem keuangan dan pasar modal di antara negara-negara anggotanya, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas finansial di kawasan. Pentingnya integrasi ini terlihat dalam potensinya untuk memperkuat daya saing ekonomi regional, meningkatkan aliran investasi, memperluas akses keuangan, serta meminimalisir risiko sistemik melalui koordinasi kebijakan dan harmonisasi regulasi (ASEAN Secretariat, 2015). Dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin mendalam, integrasi finansial ASEAN menjadi strategi penting untuk memperkuat posisi kawasan ini dalam perekonomian global.

Tahapan pembentukan Integrasi Finansial ASEAN dimulai dengan pembicaraan awal dan perencanaan strategis yang bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang koheren dan terkoordinasi. Pembicaraan ini menghasilkan dokumen penting seperti "ASEAN Vision 2020" dan "Hanoi Plan of Action," yang menetapkan visi jangka panjang dan langkah-langkah praktis untuk memperkuat kerjasama finansial di kawasan (Hill & Menon, 2010). Visi ini menekankan pentingnya

menciptakan pasar keuangan yang lebih terintegrasi dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di ASEAN. Dengan adanya perencanaan ini, negara-negara anggota mulai menyelaraskan kebijakan dan regulasi mereka untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi integrasi finansial.

Salah satu tindakan konkret pertama adalah pembentukan ASEAN Surveillance Process (ASP) pada akhir 1990-an, yang berfungsi untuk memantau dan menganalisis kondisi ekonomi makro negara-negara anggota serta mendorong transparansi dan stabilitas ekonomi. Implementasi inisiatif seperti Asian Bond Markets Initiative (ABMI) dan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) menandai langkah nyata menuju integrasi yang lebih mendalam. ABMI berfokus pada pengembangan pasar obligasi regional untuk meningkatkan likuiditas dan diversifikasi sumber pembiayaan, sementara ABIF bertujuan untuk memfasilitasi integrasi sektor perbankan melalui harmonisasi regulasi dan peningkatan akses ke pasar keuangan di seluruh ASEAN (Hill & Menon, 2010).

Manfaat dari integrasi finansial ASEAN sangat luas, mencakup dampak positif terhadap ekonomi dan stabilitas regional. Integrasi ini telah meningkatkan arus modal lintas negara, memberikan akses yang lebih luas bagi perusahaan dan investor terhadap sumber daya keuangan yang lebih besar dan beragam. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan dengan meningkatkan efisiensi alokasi modal dan mendorong investasi. Selain itu, stabilitas finansial regional telah diperkuat melalui berbagai mekanisme pengawasan dan pengaturan bersama, termasuk pembentukan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) yang menyediakan pemantauan dan analisis ekonomi makro untuk mendukung kebijakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di ASEAN. Integrasi ini juga mengurangi risiko keuangan sistemik dengan memperkuat kerjasama dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta menciptakan jaringan pengamanan keuangan regional untuk menghadapi krisis ekonomi (Park & Lee, 2011).

Peran Indonesia dalam integrasi finansial ASEAN sangat signifikan, terutama dalam pembentukan kebijakan yang mendorong kerjasama dan stabilitas finansial di kawasan. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia telah berperan aktif dalam merancang berbagai kerangka kebijakan yang mendukung integrasi finansial regional. Misalnya, Indonesia turut serta dalam penyusunan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025 yang menggarisbawahi pentingnya integrasi sektor jasa keuangan dan pasar modal. Indonesia juga mendorong inisiatif ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama antar bank di ASEAN. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, negara ini terus berupaya untuk menyelaraskan regulasi dan standar keuangan guna menciptakan pasar finansial yang lebih terintegrasi dan efisien di ASEAN (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Partisipasi aktif Indonesia dalam implementasi inisiatif regional terlihat dari berbagai langkah konkret yang diambil untuk memperkuat integrasi finansial di ASEAN. Indonesia telah menjadi tuan rumah berbagai pertemuan dan forum keuangan ASEAN, termasuk ASEAN Finance Ministers' and

Central Bank Governors' Meeting (AFMGM). Selain itu, Indonesia memainkan peran kunci dalam proyek ASEAN Payment Connectivity yang bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran antar negara anggota ASEAN, termasuk implementasi QR Cross Border. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, aktif berpartisipasi dalam berbagai kelompok kerja ASEAN yang membahas pengembangan infrastruktur keuangan dan peningkatan inklusi keuangan di kawasan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya mendukung tetapi juga memimpin dalam mewujudkan integrasi finansial ASEAN yang lebih kuat dan kohesif (Bank Indonesia, 2023).

2. Kepentingan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan konsep integrasi ekonomi dan kepentingan nasional, terdapat dua temuan penting yang muncul dalam penelitian ini. Pertama, memperkuat kerjasama ekonomi antar negara anggota ASEAN menjadi krusial dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan memaksimalkan potensi pasar bersama. Melalui integrasi yang lebih dalam, ASEAN dapat menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan perdagangan yang lebih lancar, memberikan keuntungan kompetitif bagi setiap negara anggota. Kedua, meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi lintas negara menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku bisnis, regulator, dan konsumen. Dengan mengadopsi standar yang seragam dan teknologi canggih seperti QR Cross Border, ASEAN dapat mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan transaksi lintas negara, mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan di kawasan.

2.1 Potensi Peningkatan Perdagangan

QR Cross Border adalah teknologi yang memungkinkan transaksi pembayaran lintas negara menjadi lebih efisien dengan menggunakan kode QR standar yang dapat diterima di berbagai negara ASEAN. Dalam konteks ekspor dan impor Indonesia, adopsi QR Cross Border memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam proses perdagangan internasional. Pertama-tama, QR Cross Border mempermudah proses pembayaran antara eksportir dan importir. Sebelum adanya QR Cross Border, proses pembayaran internasional sering kali melibatkan berbagai biaya tambahan seperti biaya konversi mata uang, biaya bank, dan biaya administrasi lainnya. Dengan QR Cross Border, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, karena sistem ini menghilangkan kebutuhan untuk mentransfer uang melalui jaringan perbankan tradisional yang mungkin melibatkan banyak perantara.

Pengimplementasian Kesepakatan Regional Payment Connectivity (RPC) antara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina melalui teknologi QR Code, fast payment, data, RTGS, dan transaksi mata uang lokal telah menjadi tonggak penting dalam memperkuat integrasi ekonomi regional ASEAN. RPC bertujuan untuk meningkatkan konektivitas pembayaran di ASEAN dengan

cara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif, membuka peluang baru bagi industri pariwisata dan UMKM domestik untuk mengakses pasar global secara lebih luas. Bank Indonesia (BI) telah aktif dalam mengimplementasikan kerjasama RPC, terutama dengan Bank of Thailand (BOT) dan Bank Negara Malaysia (BNM), memungkinkan wisatawan dan pengusaha dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk bertransaksi lintas negara menggunakan QRIS dengan mudah melalui ponsel mereka.

Melalui inisiatif ini, wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dapat melakukan transaksi dengan cara yang lebih efisien dan ekonomis dengan memanfaatkan QRIS, yang menggunakan mata uang lokal seperti Rupiah, Ringgit, atau Bath, tanpa perlu melibatkan konversi ke Dollar AS. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya transaksi bagi wisatawan, tetapi juga mempercepat proses pembayaran secara keseluruhan. Hasil implementasi RPC antara Indonesia-Thailand dan Indonesia-Malaysia menunjukkan hasil yang positif, seperti terlihat dari data Bank Indonesia pada Juni 2023 yang mencatat 825 transaksi Inbound QRIS Cross Border Indonesia-Thailand dengan total dana mencapai Rp 272 juta, serta 8.533 transaksi Inbound QRIS Cross Border Indonesia-Malaysia dengan total dana mencapai Rp 1.952.000.000 (Wildan, 2023).

Selain manfaat bagi sektor pariwisata, adaptasi QRIS juga memberikan keuntungan signifikan bagi lebih dari 24,2 juta UMKM di Indonesia. UMKM dapat dengan mudah melakukan transaksi non-tunai berbasis QR Code dengan pelanggan dan wisatawan asing, yang pada gilirannya meningkatkan volume penjualan dan efisiensi operasional. Penggunaan QRIS juga mengurangi biaya Merchant Discount Rate (MDR) yang harus dibayarkan oleh UMKM, dibandingkan dengan menggunakan sarana pembayaran internasional yang lebih konvensional. Dengan demikian, implementasi RPC tidak hanya memfasilitasi integrasi ekonomi ASEAN yang lebih erat, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM di tingkat regional (Rahardjo, 2023).

Penggunaan QRIS Cross Border semakin meluas dengan rencana ekspansi Bank Indonesia (BI) ke beberapa negara di Asia, seperti Arab Saudi dan Jepang, setelah suksesnya implementasi di Asia Tenggara. Langkah ini mendapat sambutan baik dari sejumlah bank di Indonesia, termasuk PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Sinarmas Tbk, yang telah aktif mengimplementasikan teknologi ini. EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menyambut baik inisiatif BI karena diyakini akan menguntungkan bisnis perbankan dengan memenuhi kebutuhan nasabah untuk bertransaksi lintas negara secara praktis dan efisien. BCA melaporkan peningkatan signifikan dalam volume transaksi QRIS Cross Border hingga lebih dari 725% dan nilai transaksi meningkat 513% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya (Sinambela, 2024).

Bank Sinarmas juga optimistis dengan prospek QRIS Cross Border, menargetkan nilai transaksi mencapai Rp 1,7 triliun dengan penambahan 50,000 pengguna baru dan 35,000 merchant baru. Meskipun nilai transaksi lintas negara Bank Sinarmas pada 2023 baru mencapai Rp 330 juta, Direktur Lending and Whole Sales Bank Sinarmas, Eka Jaya, yakin bahwa ekspansi ke Jepang dan

Arab Saudi akan mendongkrak aktivitas transaksi secara signifikan dengan menarik lebih banyak nasabah dan merchant (Sinambela, 2024).

Kerangka kerja *Local Currency Settlement* (LCS) juga membawa sejumlah manfaat signifikan bagi negara-negara ASEAN, terutama dalam memperkuat efisiensi sistem pembayaran regional. Dengan menggunakan mata uang lokal untuk menyelesaikan transaksi perdagangan dan investasi, LCS memungkinkan proses pembayaran menjadi lebih cepat dan lebih hemat biaya, mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat. Selain itu, LCS juga menyediakan alternatif lindung nilai yang dapat digunakan untuk pembiayaan ekspor dan investasi langsung, memberikan fleksibilitas tambahan bagi pelaku bisnis di ASEAN.

Meskipun penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan masih relatif kecil, dengan sebagian besar transaksi masih dilakukan dalam dolar AS, pertumbuhan penggunaan LCS telah menunjukkan potensi yang signifikan. Sejak diterapkan pertama kali oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand, LCS telah mengalami peningkatan yang positif. Pada tahun 2019 saja, total perdagangan yang menggunakan LCS mencapai lebih dari US\$83 miliar, menunjukkan adopsi yang semakin luas di kawasan ini. Langkah-langkah positif ini menandai awal yang kuat dalam memperkuat ketahanan mata uang lokal di ASEAN, yang diharapkan dapat mengurangi risiko fluktuasi mata uang asing dan mendukung stabilitas ekonomi makro di negara-negara anggota ASEAN (Fernando & Turnip, 2024).

Di masa depan, pengembangan lebih lanjut dari LCS diharapkan dapat mendorong diversifikasi transaksi ke mata uang yang beragam di ASEAN. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan stabilitas ekonomi regional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kawasan. Dengan adanya dukungan dan komitmen dari negara-negara anggota ASEAN serta institusi keuangan regional, LCS memiliki potensi untuk menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan visi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang bersatu, meningkatkan integrasi ekonomi regional secara keseluruhan.

Secara general, RPC melalui QR Cross Border menjadi sarana penting dalam memperkuat kerjasama ekonomi ASEAN, mempercepat transaksi lintas negara, dan memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku ekonomi, baik dalam hal efisiensi biaya maupun akses ke pasar yang lebih luas. Dengan terus meningkatnya adopsi dan adaptasi teknologi ini di seluruh kawasan ASEAN, diharapkan integrasi ekonomi regional dapat semakin meningkat, memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama di Asia Tenggara.

2.2 Transparansi dan Keamanan Dalam Transaksi Lintas Negara

Transparansi dan keamanan dalam transaksi lintas negara menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi ekonomi modern. Di ASEAN, adopsi teknologi QR Cross Border telah menjadi solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, transparansi yang ditingkatkan memastikan bahwa setiap transaksi dapat dipantau dengan lebih baik oleh regulator dan pihak terkait lainnya. QR Cross Border memungkinkan untuk pencatatan digital yang akurat dan terdokumentasi

dengan baik, mengurangi potensi untuk kesalahan manusia dan manipulasi data (Salsabila, 2023). Hal ini memberikan keyakinan kepada pelaku bisnis untuk melakukan transaksi lintas negara tanpa kekhawatiran akan ketidakjelasan atau kecurangan.

Kedua, keamanan transaksi menjadi fokus utama dengan adanya QR Cross Border. Teknologi ini memanfaatkan standar keamanan tinggi dalam proses pembayaran, termasuk enkripsi data dan verifikasi yang ketat, untuk melindungi informasi sensitif seperti data keuangan dan identitas pengguna. Dengan demikian, QR Cross Border tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan transaksi, tetapi juga mengurangi risiko terhadap kebocoran data dan serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional maupun regional.

QR Cross Border memungkinkan untuk pencatatan digital yang akurat dan terdokumentasi dengan baik, mengurangi potensi untuk kesalahan manusia dan manipulasi data. Dalam dunia bisnis internasional yang kompleks dan seringkali rentan terhadap kesalahan pencatatan, penggunaan teknologi QR Cross Border menawarkan solusi yang signifikan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, setiap transaksi dapat diotentikasi dan dilacak dengan presisi yang tinggi, sehingga meminimalkan risiko kesalahan yang sering terjadi dalam pencatatan manual. Proses digitalisasi ini memastikan bahwa data yang terekam bersifat real-time dan dapat diakses kapan saja oleh pihak-pihak yang berkepentingan, memastikan transparansi yang lebih besar dalam setiap langkah transaksi (López-González, 2021).

Lebih lanjut, teknologi ini memberikan keyakinan kepada pelaku bisnis untuk melakukan transaksi lintas negara tanpa kekhawatiran akan ketidakjelasan atau kecurangan. Ketika setiap langkah transaksi dapat diotentikasi dan diverifikasi secara digital, kemungkinan terjadinya manipulasi data atau kecurangan dapat diminimalisir. Dengan adanya rekaman digital yang akurat dan terdokumentasi dengan baik, para pelaku bisnis dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam menjalankan operasional mereka. Keyakinan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi bisnis tetapi juga mendorong lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional, sehingga memperkuat ekonomi global secara keseluruhan (López-González, 2021).

Lebih jauh lagi, pencatatan digital melalui QR Cross Border juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi internasional dan standar akuntansi. Setiap transaksi yang terekam secara digital dapat diakses dan diaudit oleh pihak yang berwenang, sehingga memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi. Dengan demikian, risiko penalti atau denda akibat ketidakpatuhan dapat dihindari, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan (Kim, Endriga, & Ardaniel, 2022).

Selain itu, penggunaan QR Cross Border memungkinkan pelaku bisnis untuk merespon lebih cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan data yang tersimpan dan dikelola secara efisien, analisis dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar global

yang terus berubah. Perusahaan dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka berdasarkan data yang valid dan terpercaya, meningkatkan kemampuan mereka untuk memenangkan persaingan di pasar internasional (Kim, Endrigo, & Ardaniel, 2022).

Dalam konteks ASEAN, implementasi QR Cross Border juga mempromosikan integrasi lebih lanjut di antara negara-negara anggota. Standar yang seragam dan teknologi canggih memungkinkan harmonisasi regulasi keuangan di kawasan ini, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terprediksi dan menguntungkan untuk investasi lintas negara. Dengan memperkuat infrastruktur teknologi finansial seperti QR Cross Border, ASEAN dapat mengklaim posisinya sebagai blok ekonomi yang lebih bersatu dan kompetitif di pasar global.

Dalam analisis yang lebih luas, adopsi QR Cross Border juga memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan. Teknologi ini mempermudah akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau, terutama di daerah pedesaan dan terpencil di ASEAN. Dengan memfasilitasi transaksi yang lebih murah dan lebih cepat, QR Cross Border membantu mengurangi kesenjangan finansial dan meningkatkan partisipasi ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, integrasi QR Cross Border dalam sistem finansial ASEAN bukan hanya tentang meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi lintas negara, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh kawasan ASEAN.

Tantangan Implementasi QR Cross Border

Garis Implementasi QR Cross Border di ASEAN, khususnya di Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur digital yang belum merata di seluruh Indonesia. Meskipun wilayah perkotaan mungkin memiliki akses yang baik terhadap teknologi dan internet, banyak daerah pedesaan dan terpencil masih mengalami keterbatasan. Ketidakmerataan ini dapat menghambat adopsi QR Cross Border secara luas, karena sebagian besar masyarakat di daerah-daerah tersebut mungkin tidak memiliki akses atau pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi ini.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai ada sejumlah hambatan yang melintangi akselerasi dari penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antara negara atau QRIS Cross Border. Salah satu hambatan utama adalah kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia. Meskipun wilayah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dan internet, banyak daerah pedesaan dan terpencil masih mengalami keterbatasan infrastruktur. Ketidakmerataan ini menghambat adopsi QRIS secara luas karena masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak memiliki akses yang memadai untuk memanfaatkan teknologi ini (Damara, 2022).

Selain itu, kapabilitas digital yang masih rendah juga menjadi tantangan besar. Banyak pelaku usaha dan masyarakat belum sepenuhnya memahami cara kerja dan manfaat dari teknologi QRIS. Edukasi dan pelatihan mengenai penggunaan dan keamanan teknologi digital ini perlu ditingkatkan

agar masyarakat dan pelaku bisnis dapat mengadopsinya dengan percaya diri. Tanpa pemahaman yang memadai, teknologi ini tidak akan mendapatkan penerimaan yang luas dan penggunaannya akan terbatas.

Tantangan lain yang diidentifikasi oleh Kadin adalah kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan uang tunai dan belum memiliki rekening bank. Di banyak daerah di Indonesia, penggunaan uang tunai masih sangat dominan, dan banyak orang belum terintegrasi ke dalam sistem perbankan formal. Hal ini menghambat adopsi teknologi pembayaran digital seperti QRIS, karena masyarakat belum siap untuk beralih dari metode pembayaran konvensional ke metode pembayaran digital.

Keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian penting dalam implementasi teknologi digital. Risiko kebocoran data, hacking, dan penyalahgunaan informasi pribadi adalah tantangan yang harus dihadapi. Indonesia perlu memastikan bahwa sistem QR Cross Border memiliki protokol keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna. Ini termasuk enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan regulasi yang ketat untuk mencegah akses tidak sah dan penyalahgunaan data (Rusdiah, 2020).

Selain itu, regulasi dan kebijakan yang beragam di setiap negara ASEAN menambah kompleksitas implementasi QR Cross Border. Setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda terkait teknologi finansial dan transaksi lintas negara. Indonesia harus menavigasi dan menyelaraskan regulasi domestiknya dengan standar internasional dan regional untuk memastikan kelancaran implementasi. Hal ini memerlukan kerjasama yang erat antara otoritas regulasi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menciptakan kerangka kerja yang harmonis dan konsisten.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menyatakan bahwa implementasi QRIS Cross Border masih menghadapi sejumlah risiko dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan regulasi di masing-masing negara yang perlu disesuaikan. Regulasi yang berbeda ini bisa mencakup aturan tentang keamanan data, prosedur verifikasi, hingga kebijakan perlindungan konsumen. Harmonisasi regulasi antar negara merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa sistem pembayaran QRIS Cross Border dapat berjalan dengan lancar dan aman (Putri, 2023).

Selain itu, ada juga tantangan terkait model bisnis dan proses operasional. Setiap negara mungkin memiliki model bisnis yang berbeda dalam hal bagaimana sistem pembayaran diatur dan dioperasikan. Perbedaan ini dapat mencakup metode penyelesaian transaksi, struktur biaya, serta kerjasama dengan bank dan penyedia layanan pembayaran lokal. Keselarasan dalam model bisnis dan proses operasional antara negara-negara yang terlibat sangat penting untuk memastikan interoperabilitas dan efisiensi sistem. Perbedaan spesifikasi pembayaran juga menjadi hambatan dalam implementasi QRIS Cross Border. Setiap negara mungkin memiliki spesifikasi teknis yang berbeda untuk sistem pembayaran digital mereka, yang mencakup format data, protokol keamanan, dan standar teknis lainnya. Keselarasan spesifikasi teknis ini diperlukan untuk memastikan bahwa

transaksi dapat diproses dengan cepat dan aman tanpa adanya masalah kompatibilitas (Putri, 2023).

Keanggotaan industri di masing-masing negara juga memainkan peran penting dalam implementasi QRIS Cross Border. Berbagai pemangku kepentingan dalam industri pembayaran, seperti bank, penyedia layanan pembayaran, dan regulator, perlu bekerja sama dengan erat. Kolaborasi yang kuat antara industri di setiap negara adalah kunci untuk mengatasi tantangan dan memastikan kelancaran implementasi. Biaya investasi yang relatif tinggi juga menjadi tantangan yang signifikan. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pembayaran lintas negara membutuhkan investasi yang besar dalam hal infrastruktur, teknologi, dan pelatihan. Biaya ini bisa menjadi beban bagi beberapa pelaku bisnis, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta untuk membantu mengatasi hambatan biaya ini (Rahardjo, 2023).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Filianingsih Hendarta menyarankan bahwa terobosan perlu dilakukan melalui berbagai aspek. Ini termasuk model bisnis, regulasi, teknik, operasional, dan aspek kelembagaan. Selain itu, penguatan kerjasama antara negara-negara yang terhubung juga sangat penting. Kolaborasi yang erat dan koordinasi yang baik antara negara-negara ASEAN akan membantu mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan keberhasilan implementasi QRIS Cross Border (Putri, 2023).

Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi QR Cross Border juga masih perlu ditingkatkan. Edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat, cara penggunaan, serta keamanan teknologi ini penting untuk memastikan penerimaan yang baik dari masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat mungkin ragu atau enggan untuk menggunakan teknologi ini, yang pada akhirnya dapat menghambat adopsi secara luas. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat melalui kampanye informasi dan program pelatihan. Biaya implementasi teknologi baru juga menjadi tantangan. Investasi awal yang besar untuk mengembangkan infrastruktur, mengadakan pelatihan, dan membangun sistem keamanan mungkin menjadi beban bagi beberapa pelaku bisnis, terutama UKM. Pemerintah mungkin perlu memberikan insentif atau dukungan finansial untuk membantu UKM mengadopsi teknologi ini.

Terakhir, kesiapan lembaga keuangan di Indonesia untuk mengadopsi dan mendukung teknologi QR Cross Border juga menjadi faktor kunci. Lembaga keuangan perlu menyesuaikan sistem mereka, melatih staf, dan bekerja sama dengan pihak berwenang dan penyedia teknologi untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar internasional (Shofa, 2023). Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan strategis, Indonesia dapat berhasil mengimplementasikan QR Cross Border di ASEAN, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi lintas negara.

E. Kesimpulan

Implementasi QR Cross Border memiliki kepentingan yang signifikan bagi Indonesia dalam hal ekonomi, politik, dan keamanan. Integrasi sistem finansial ini mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat kerjasama ekonomi regional dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sistem pembayaran lintas negara memungkinkan transaksi keuangan yang lebih efisien dan cepat, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan inklusi keuangan. Bagi Indonesia, ini berarti memperluas akses layanan keuangan ke masyarakat ASEAN dan meningkatkan stabilitas finansial regional. QR Cross Border juga mendukung tujuan politik dan keamanan dengan memperkuat hubungan bilateral dan regional serta mengurangi risiko finansial melalui transparansi dan keamanan transaksi lintas negara.

Untuk mengatasi tantangan implementasi QR Cross Border, beberapa rekomendasi kebijakan penting perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan di Indonesia dan ASEAN. Pertama, fokus pada harmonisasi regulasi dan kebijakan antar negara anggota, termasuk penyalarsan standar keamanan data dan prosedur verifikasi transaksi. Kedua, meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital untuk memastikan akses yang merata ke teknologi di seluruh wilayah, termasuk daerah pedesaan dan terpencil. Ketiga, meningkatkan edukasi dan pelatihan mengenai penggunaan teknologi digital untuk memperkuat kapabilitas digital masyarakat dan pelaku bisnis. Terakhir, mempertahankan dan memperkuat kerjasama regional untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan efektif bagi implementasi QR Cross Border.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Data yang digunakan terutama berasal dari sumber kualitatif, yang mungkin tidak mencakup seluruh dinamika yang terjadi dalam implementasi QR Cross Border. Selain itu, cakupan penelitian ini lebih fokus pada aspek kebijakan dan teknis, sementara dampak sosial dan ekonomi jangka panjang mungkin belum sepenuhnya terjelajahi. Perbedaan konteks nasional di setiap negara ASEAN juga menghadirkan tantangan dalam generalisasi temuan penelitian ini.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk fokus pada dampak jangka panjang dari implementasi QR Cross Border, termasuk analisis kuantitatif tentang bagaimana sistem ini mempengaruhi inklusi keuangan, stabilitas ekonomi, dan dinamika pasar di negara-negara ASEAN. Studi kasus spesifik di beberapa negara anggota ASEAN dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan keberhasilan implementasi di berbagai konteks nasional. Selain itu, penelitian perlu mengkaji aspek sosial dari adopsi teknologi ini, termasuk bagaimana masyarakat dan bisnis beradaptasi dengan sistem pembayaran baru dan apa saja hambatan yang mereka hadapi dalam proses adopsi tersebut.

Daftar Pustaka

- ASEAN Secretariat. (2015). *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (t.thn.). *Finance Integration*. Dipetik March 7, 2024, dari ASEAN.ORG: <https://asean.org/our-communities/economic-community/finance-integration/>
- ASEAN Secretariat. (t.thn.). *Overview*. Dipetik April 24, 2024, dari Asean.org: <https://asean.org/our-communities/economic-community/>
- ASEAN Secretariat. (t.thn.). *The Founding of ASEAN*. Dipetik April 24, 2024, dari ASEAN.ORG: <https://asean.org/the-founding-of-asean/>
- Bakry, U. S. (2015). *Ekonomi Politik Internasional : Suatu Pengantar*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia. (2023, Mei 9). *BANK INDONESIA BERSAMA INDUSTRI DORONG PEMBAYARAN LINTAS NEGARA UNTUK PERKUAT EKONOMI ASEAN*. Diambil kembali dari [bi.go.id: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2512123.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2512123.aspx)
- BPMI Setpres. (2023, October 18). *Presiden Jokowi Paparkan Empat Hal Penting dalam Pembangunan Konektivitas*. Retrieved from [Setneg.go.id: https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_paparkan_empat_hal_penting_dalam_pembangunan_konektivitas](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_paparkan_empat_hal_penting_dalam_pembangunan_konektivitas)
- Damara, D. (2022, Februari 15). *Implementasi QRIS Cross Border Dinilai Punya Sejumlah Hambatan*. Diambil kembali dari [Bisnis.com: https://finansial.bisnis.com/read/20220215/90/1500680/implementasi-qr-is-cross-border-dinilai-punya-sejumlah-hambatan](https://finansial.bisnis.com/read/20220215/90/1500680/implementasi-qr-is-cross-border-dinilai-punya-sejumlah-hambatan)
- Dinger, V., & te Kaat, D. M. (2020). Cross-border capital flows and bank risk-taking. *Journal of Banking & Finance*, 1 August 2020. https://pure.rug.nl/ws/files/126788914/1_s2.0_S0378426620301084_main.pdf
- Dougherty, J. E., & Robert L. Pfaltzgraff, J. (2001). *Contending Theories of International Relations*. New York: Addison Wesley Longman.
- Fernando, J., & Turnip, E. Y. (2024). Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam Mempromosikan Penggunaan Local Currency Settlement dan QR Code Lintas Batas terkait Transaksi Perdagangan di Asia Tenggara. *Jurnal Sentris*, 4(2), 114-134. doi:<https://doi.org/10.26593/sentris.v4i2.7124.114-134>
- Guild, J. (2023, June 13). *ASEAN's Cross-Border Digital Payment System Explained*. Diambil kembali dari [The Diplomat: https://thediplomat.com/2023/06/aseans-cross-border-digital-payment-system-explained/](https://thediplomat.com/2023/06/aseans-cross-border-digital-payment-system-explained/)
- Hill, H., & Menon, J. (2010). *ASEAN Economic Integration: Features, Fulfillments, Failures and the Future*. Asian Development Bank.
- Junaedi, D., Supriyatna, R. K., Arsyad, M. R., & Amalia, R. S. (2023). "Peluang dan Ancaman Disruptif Digital untuk Negara Bangsa." *Sci-Tech Journal*, 2(2), 120-141. DOI: 10.56709/stj.v2i2.71
- Kementerian Luar Negeri RI. (2024, January 8). *Diplomasi Ekonomi Salah Satu Wujud Konkret Dalam Kebijakan Luar Negeri*. Diambil kembali dari [Kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/5665/view/diplomasi-ekonomi-salah-satu-wujud-konkret-dalam-kebijakan-luar-negeri](https://kemlu.go.id/portal/id/read/5665/view/diplomasi-ekonomi-salah-satu-wujud-konkret-dalam-kebijakan-luar-negeri)
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kim, K., Endriga, B., & Ardaniel, Z. (2022). *Driving Inclusive Digitalization in Trade and Trade Finance*. Bali: Asian Development Bank.
- Kominfo. (2023, July 27). *QRIS Simplifies Payments in ASEAN Countries*. Diambil kembali dari [ASEAN2023: https://asean2023.id/en/news/qr-is-simplifies-payments-in-asean-countries](https://asean2023.id/en/news/qr-is-simplifies-payments-in-asean-countries)
- Liang, C. Y. C., & Lin, P.-C. (2022). Financial integration and the comparative advantage of exports. *Journal of Financial Integration*, 13 May 2022. <https://dx.doi.org/10.1080/09638199.2022.2073603>
- López-González, J. (2021, April 21). *The changing nature of digital trade, current and future barriers and ideas to overcome them*. Diambil kembali dari [Wilsoncenter.org: https://www.wilsoncenter.org/](https://www.wilsoncenter.org/)

- <https://www.wilsoncenter.org/article/changing-nature-digital-trade-current-and-future-barriers-and-ideas-overcome-them>
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Oatley, T. (2018). *International Political Economy (6th ed.)*. New York: Routledge.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015, Januari 6). *Siaran Pers: Indonesia Sepakat Dukung Integrasi Perbankan ASEAN*. Diambil kembali dari OJK.GO.ID: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/siaran-pers-indonesia-sepakat-dukung-integrasi-perbankan-asean.aspx>
- Park, C.-Y., & Lee, J.-W. (2011). *Financial Integration in Emerging Asia: Challenges and Prospects*. Asian Development Bank.
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, K. A. (2023, May 9). *QRIS Diperluas ke 5 Negara ASEAN, Ini Tantangan dan Peluangnya*. Retrieved from Infobanknews.com: https://infobanknews.com/qr-is-diperluas-ke-5-negara-asean-ini-tantangan-dan-peluangnya/#google_vignette
- Rahardjo, C. R. (2023, Agustus 13). *QRIS "Cross Border", Potensi Pertumbuhan Baru UMKM*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2023/08/13/140118526/qr-is-cross-border-potensi-pertumbuhan-baru-umkm?page=all>
- Rusdiah, R. (2020). *Keamanan data dan privasi Keamanan data dan privasi*. Jakarta: Perkumpulan Basis Data Indonesia.
- Salsabila, S. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI QRIS ANTAR NEGARA*. Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
- Shofa, J. N. (2023, August 11). *Challenges to ASEAN Payment Connectivity Dream*. Diambil kembali dari Jakartaglobe.co.id: <https://jakartaglobe.id/business/challenges-to-asean-payment-connectivity-dream>
- Sinambela, N. B. (2024, Februari 22). *BI Akan Perluas QRIS Cros Border, Bankir Yakin Bagus untuk Bisnis*. Diambil kembali dari kontan.co.id: <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-akan-perluas-qr-is-cros-border-bankir-yakin-bagus-untuk-bisnis>
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bali : Nilacakra.
- Taghizadeh-Hesary, F., Minh Phi, N. T., Hong, H., & Chu, V. (2019). Does financial integration matter for financial development? Evidence from the East Asian and Pacific Region. *Journal of Economic Integration*, 29 November 2019. https://www.e-jei.org/upload/JEI_34_4_591_618_2013600204.pdf
- Wildan, M. A. (2023, November 5). *Menjembatani Perbatasan Transaksi : QRIS Cross-Border Majukan Ekonomi Indonesia dan ASEAN*. Diambil kembali dari goodnewsfromindonesia.id: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/05/menjembatani-perbatasan-transaksi-qr-is-cross-border-majukan-ekonomi-indonesia-dan-asean>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL

hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.5.a/137/HI/FISIP-UMM/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **Irmalia Fardhani**
NIM : **201710360311002**
Judul Skripsi : **Kepentingan Indonesia dalam Integrasi Finansial ASEAN Melalui QR Cross Border**
Dosen Pembimbing : **1. Demeiati Nur Kusumaningrum, M.A.**
2. Dedik Fitra Suhermanto, M.Hub.Int.

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	Tugas Akhir
	15%
Similarity	4%

**) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.

Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 561 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutarni No.188 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id